

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam kurun beberapa tahun terakhir ini, peranan penerimaan perpajakan cenderung sangat signifikan sebagai sumber penerimaan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Disaat penerimaan sektor perminyakan tidak dapat lagi diharapkan sebagai penopang utama APBN dan ketika perekonomian Indonesia dilanda krisis bencana alam, penerimaan pajak tampil sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional (John Hutagaol, 2007:7).

Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak bumi dan gas bumi tapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara, dan struktur penerimaan negara sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Hakekatnya pemungutan pajak oleh Negara merupakan wujud dari rasa pengabdian, kewajiban dan partisipasi rakyat, yang dalam hal ini sebagai Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya guna membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional.oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak (Waluyo, 2008:5).

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system*, yaitu Wajib Pajak sendiri yang menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya ke negara. Pada sistem ini,

Wajib Pajak yang aktif sedangkan aparat perpajakan sifatnya hanya mengawasi dan membina Wajib Pajak (Meliala dan Oetomo, 2008).

Seiring perkembangan zaman mendorong pemerintah untuk terus mereformasi sistem perpajakannya. Untuk meningkatkan potensi kepatuhan Wajib pajak dalam sistem perpajakan modern ini pemerintah membangun fasilitas-fasilitas yang menunjang sistem perpajakan modern seperti:

1. Tersedianya *Account Representatives* (AR) sebagai ujung tombak pelayanan dan perantaran antara DJP dengan WP yang mengemban tugas melayani setiap Wajib Pajak
2. Pembentukan contact center : *Complain Center, Call Center, Non Filers Activation Center.*
3. TPT (*Service Counter*)
4. pelayanan dengan menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini yang dikenal dengan sebutan *e-System* antara lain *e-Payment* (pembayaran pajak secara on line), *e-Registrasion* (pendaftaran wajib pajak melalui internet), *e-Filling* (pelaporan pajak melalui internet), *e-SPT* (pengisian SPT dengan program yang telah disediakan DJP), dan *e-Counseling* (konsultasi secara on line) (Rusdi Yanis 2009).

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai objek penelitian karena dalam Kantor Pelayanan Pajak, penulis dapat mendapatkan data dan informasi lengkap mengenai perpajakan dan informasi mengenai Wajib Pajak tertentu yang sudah menggunakan dan mematuhi sistem administrasi perpajakan modern

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat topik ini sebagai topik yang penulis akan bahas Karena penulis ingin mengetahui bagaimana pencapaian penerapan sistem administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan WP. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Pemeriksaan Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menjalankan Kewajibannya(Studi kasus pada KPP Pratama Majalaya Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan perpajakan berpengaruh secara parsial dan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap sistem administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan WP.

2. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap sistem administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan WP.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan perpajakan terhadap sistem administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan WP.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, dalam penulisan ilmiah ini dapat diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa, terlebih lagi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Bagi praktisi perpajakan, hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat, khususnya dalam hal meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dengan cara mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Bagi pembaca atau masyarakat, dalam penulisan ilmiah ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.